

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Disusun Oleh :

Nisya Permata Putri
1700860201034

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

TAHUN 2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

NAMA : NISYA PERMATA PUTRI

NIM : 1700860201034

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAMBI PROVINSI JAMBI.

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan ujian skripsi pada tanggal seperti dibawah ini :

Jambi, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj. Susilawati, SE, M.Si

M. Syukri, SE.Sy, M.Si

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Hj. Susilawati, SE, M.Si

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan panitian penguji skripsi dan komperhensif fakultas ekonomi Universitas Batanghari Jambi :

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Agustus 2021
Jam : 13:00 – 15:00
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Universitas Batanghari

PANITIA PENGUJI		
Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dr. M Zahari MS, M.Si	Ketua	_____
M. Syukri, SE.Sy, M.Si	Sekretaris	_____
Dr. Sudirman, SE, M.E.I	Penguji Utama	_____
Hj. Susilawati, SE, M.Si	Anggota	_____

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA

Hj. Susilawati, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisya Permata Putri

NIM : 1700860201034

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing : Hj. Susilawati, SE, M.Si

M. Syukri, SE.Sy, M.Si

Judul : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAMBI.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar dan bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, 19 Agustus 2021

NISYA PERMATA PUTRI

1700860201034

ABSTRAK

NISYA PERMATA PUTRI / 1700860201034 / 2021 / “PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI” / pembimbing I Hj. Susilawati, SE, M.Si. pembimbing II M. Syukri, SE.Sy, M.Si

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia yang lebih mandiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Akan tetapi pemerataan persebaran penduduk, potensi, dan sumber penerimaan maupun pengeluaran pemerintah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih terjadi ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi secara simultan dan parsial.

Dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (BAKEUDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Provinsi Jambi secara geografis terletak $0^{\circ}45'$ sampai $2^{\circ}45'$ lintang selatan dan antara $101^{\circ}10'$ sampai $104^{\circ}55'$, Luas Provinsi Jambi 53.435km^2 . Provinsi Jambi meliputi 10 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara simultan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.

Untuk Pemerintah Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi sehingga dapat meningkatkan PAD atau menambah penghasilan daerah tersebut

ABSTRACT

NISYA PERMATA PUTRI / 1700860201034 / 2021 / "INFLUENCE OF THE NUMBER OF POPULATION AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON ORIGINAL INCOME OF THE JAMBI PROVINCE" / supervisor I Hj. Susilawati, SE, M.Sc. supervisor II M. Syukri, SE.Sy, M.Si

Economic development is a stage of activity towards a more advanced Indonesia. In this development, the community and the government are able to make the State of Indonesia more independent in the implementation of its government system. Development is an effort to make social change for a better life. Development is all change processes carried out through conscious and planned efforts to achieve a goal to improve various aspects of people's lives. This development is carried out to spur equitable development in order to increase the potentials possessed by each region. However, the even distribution of population, potential, and sources of government revenues and expenditures between regencies/cities of Jambi Province is still an imbalance. This study aims to determine the effect of the population and government expenditure of Jambi Province simultaneously and partially.

And the data used is secondary data obtained from the Regional Finance Agency of Jambi Province (BAKEUDA) and the Central Statistics Agency (BPS) of Jambi Province. The analytical method used is multiple linear regression analysis.

Jambi Province is geographically located 0045' to 2045' south latitude and between 101010' to 104055', Jambi Province area is 53,435km². Jambi Province covers 10 regencies/cities.

Based on the results of data processing, it was found that the population and government spending simultaneously and significantly affected the Jambi Province's original revenue, while the partial test results showed that the population had no significant effect on the Jambi Province's original regional income, while government expenditure had a significant effect on the Jambi Province's original revenue. .

For the Jambi Provincial Government, it is hoped that it can further develop the potential sources of regional income or economic development in Jambi Province so that it can increase PAD or increase regional income.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI”**.

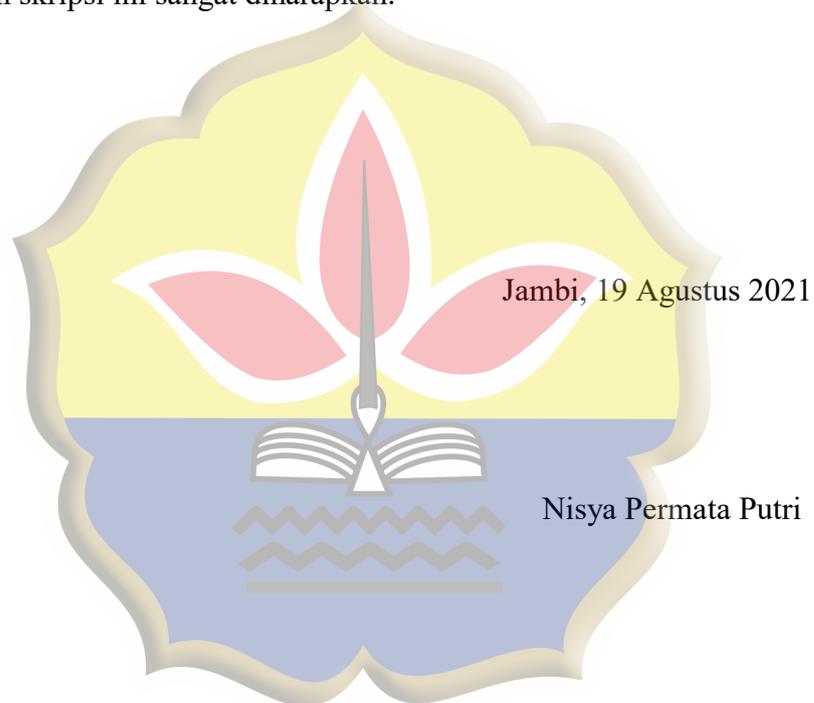
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Keluarga saya Bapak (Supriadi), Ibu (Gusnida) dan Adik-adik saya (Dio, Aulia, Wawa) yang selalu akan menjadi bagian penting dalam setiap perjuangan penulis dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.AK,CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi, Sekaligus Selaku Pembimbing I.
4. Bapak M. Syukri, SE.Sy, M.Si Selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan memperlancar aktivitas penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Buat teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan di Universitas Batanghari Jambi 2017 khususnya Susi Susanti, M. Batara Alfazri, Firman Permana, Afa Tiyan Perdana dan Amelia Agustin. Terimakasih atas dukungan dan diskusi yang selalu membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Buat teman-teman diluar Universitas Batanghari Jambi khususnya Triana, Erika Arwiyah, Martin. Terimakasih atas dukungan dan support yang selalu membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap skripsi ini menjadi kontribusi serta menambah pustaka dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan. Saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan ketidaksempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.



DAFTAR ISI

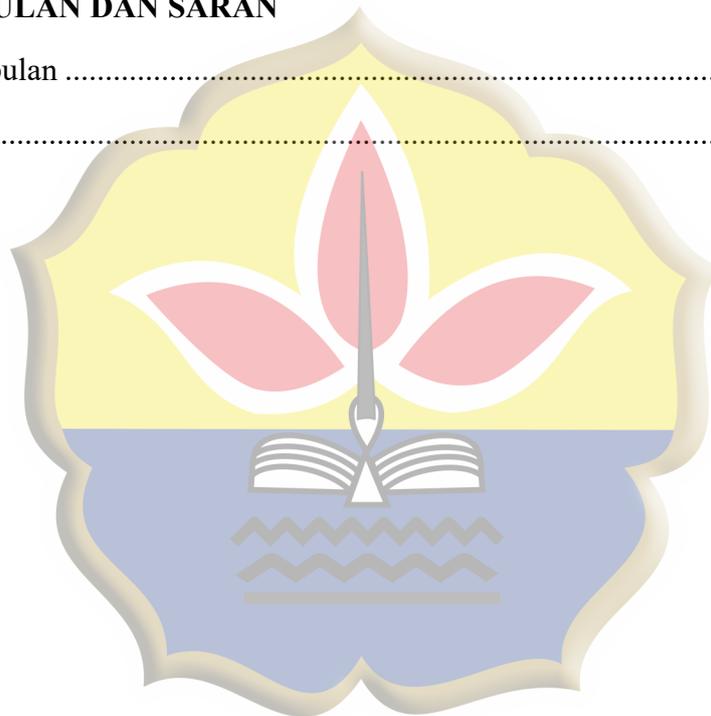
HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Otonomi Daerah.....	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.2.1 Pajak Daerah	17
2.1.2.2 Retribusi Daerah	21
2.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	22
2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD.....	23

2.1.3	Pengeluaran Pemerintah.....	26
2.1.3.1	Teori Makro.....	28
2.1.3.2	Teori Mikro.....	32
2.1.4	Jumlah Penduduk	36
2.1.5	Hubungan Dan Keterkaitan Antar Variabel.....	40
2.2	Penelitian Terdahulu	43
2.3	Kerangka Pemikiran.....	46
2.4	Hipotesis.....	47
2.5	Metode Penelitian.....	48
2.5.1	Metode Penelitian Yang Digunakan	48
2.5.2	Jenis Dan Sumber Data	48
2.5.3	Metode Pengumpulan Data.....	49
2.6	Metode Analisis	49
2.6.1	Koefisien Korelasi (R)	51
2.6.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	51
2.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	52
2.6.4	Pengujian Hipotesis.....	55
2.7	Operasional Variabel.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN		
3.1	Letak Geografis Provinsi Jambi	60
3.2	Topografi.....	62
3.3	Kependudukan.....	63
3.4	Struktur Perekonomian.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	68
4.1.1	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD	68
4.1.1.1	Uji Asumsi Klasik	68
4.1.1.2	Analisis Regresi.....	73
4.1.1.3	Koefisien Korelasi (R).....	74

4.1.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)	75
4.1.1.5 Pengujian Hipotesis	76
4.2 Pembahasan.....	79
4.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Secara Simultan .	79
4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Secara Parsial.....	80
4.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Secara Parsial	81
4.3 Implikasi Kebijakan	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
1.1	Perkembangan Realiasi PAD Provinsi Jambi.....	4
1.2	Jumlah Penduduk Penduduk Provinsi Jambi.....	6
1.3	Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi	9
3.1	Luas Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi	62
3.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jambi	64
3.3	Pertumbuhan Ekonomi Persektor ADHK Provinsi Jambi..	66
4.1	Uji Normalitas	69
4.2	Uji Multikolinearitas.....	70
4.3	Uji Autokorelasi	72
4.4	Analisis Linear Berganda	73
4.5	Koefisien Korelasi	75
4.6	Koefisien Determinasi	76
4.7	Uji F.....	77
4.8	Uji T.....	78

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal
2.1	Hubungan Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	46
4.1	Uji Heteroskedastisitas	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia yang lebih mandiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar (Arsyad, 2010:373).

Pola hubungan pemerintah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengalami perubahan, yang sebelumnya era sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan terhadap masyarakat. Disisi lain pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Husna, 2015:01).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan atas UU No. 33 Tahun 2004 tercantum bahwa perolehan penggunaan kekayaan daerah diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, serta PAD lainnya yang dianggap sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan asli daerah menjadi sektor yang sangat penting, yang salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan sumber dana dari daerah sendiri.

Rendahnya PAD dikarenakan realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah

dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (kuncoro, 2004:8).

Demikian halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Pekembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2010-2019

Tahun	Anggaran PAD (Juta)	Realisasi PAD (Juta)	Perkembangan (%)
2010	535.753.443.786	686.629.362.314,45	128,16
2011	641.658.215.660	984.232.579.912,83	153,39
2012	753.366.207.083	995.202.289.115,94	132,10
2013	902.554.697.570	1.063.879.903.502,10	110,56
2014	1.208.837.984.507	1.381.997.355.763,14	105,99
2015	1.253.624.335.381	1.241.223.028.001,76	(99,01)
2016	1.321.867.908.750	1.233.514.664.109,54	(93,32)
2017	1.426.696.725.798	1.580.304.867.342,36	110,77
2018	1.490.504.569.321	1.656.569.597.282,27	111,14
2019	1.566.447.128.511	1.651.089.944.335,33	105,40

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2020

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jambi dari tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi (naik turun) setiap tahunnya. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tertinggi dalam 10 tahun terakhir berada pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp.984.232.579.912 yakni naik sebesar 153,39 % dari yang di anggarakan sebesar 641.658.215.660 . Namun di tahun 2015-2016

perkembangan realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 99,01% dan 93,32%.

Bicara terkait keberhasilan perekonomian hal ini dapat dilihat dari adanya penduduk, yang mana penduduk merupakan penggerak dari sektor-sektor perekonomian (Oktiani, 2021: 17). Apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2014:110).

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Pajak merupakan gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk meratakan pendapatan dengan menetapkan tarif yang progresif (Soemitro, 1997:41).

Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita *over population*, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin, namun demikian

karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi sangat kecil (Rosyidi, 2002:92). Jumlah Penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2010-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut tabel jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2019.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Usia Produktif Provinsi Jambi
Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2010	2.061.713	-
2011	2.112.285	2,508
2012	2.132.475	2285
2013	2.212.226	4305
2014	2.261.452	0,826
2015	2.309.978	1,723
2016	2.358.420	1,672
2017	2.406.347	1,622
2018	2.452.966	1,572
2019	2.498.673	1,521

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2020

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah penduduk usia produktif Provinsi Jambi mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk dalam tabel 1.2 diambil dari catatan Badan Pusat Statistik penduduk tahun 2019 keadaan Januari-juni 2019. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 2.061.713 jiwa meningkat hingga pada tahun 2019 Jumlah penduduk Provinsi Jambi menjadi 2.498.673 jiwa.

Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah, apabila semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah

yang bersangkutan, namun itu bukan berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus selalu di tingkatkan tanpa memperhitungkan aspek efisiensinya. Pengeluaran pemerintah ini akan dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan (Anwar, 1989:47).

Disisi lain, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga penerimaan. penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung dan tidak langsung. Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian (Guritno, 1998).

Pengeluaran pemerintah diperuntukkan dalam membeli barang dan jasa, dari kegiatan tersebut pemerintah tidak hanya melakukan pengeluaran semata-mata, melainkan adanya kegiatan dalam hal penerimaan berupa pajak dan retribusi sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dalam hal membangun sarana publik yang seluruh masyarakat dapat menikmati dan mempergunakannya sehingga memperlancar kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan pemerintah sehingga sumber penerimaan pemerintah akan bertambah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengeluaran pemerintah dengan keuangan yang sangat bervariasi. Berikut data pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010-2019.

Tabel 1.3
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun 2010-2019

Tahun	Anggaran Pengeluaran Pemerintah (Juta)	Realisasi Pengeluaran Pemerintah (Juta)	Perkembangan (%)
2010	879.597.624.287	815.863.302.775	(92,75)
2011	1.129.163.000.460	989.902.384.414	(87,67)
2012	1.470.724.332.719	1.363.635.887.510	(92,72)
2013	1.915.592.554.041	1.717.743.739.628	(89,67)
2014	1.976.956.404.280	1.721.517.299.783	(87,09)
2015	1.825.339.129.976	1.503.875.848.545	(82,39)
2016	1.856.677.190.191	1.645.157.535.579	(88,18)
2017	2.096.868.686.250	1.886.520.771.008	(89,97)
2018	2.110.526.806.715	1.792.260.463.127	(84,92)
2019	2.235.189.501.980	1.890.553.512.843	(84,58)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2020

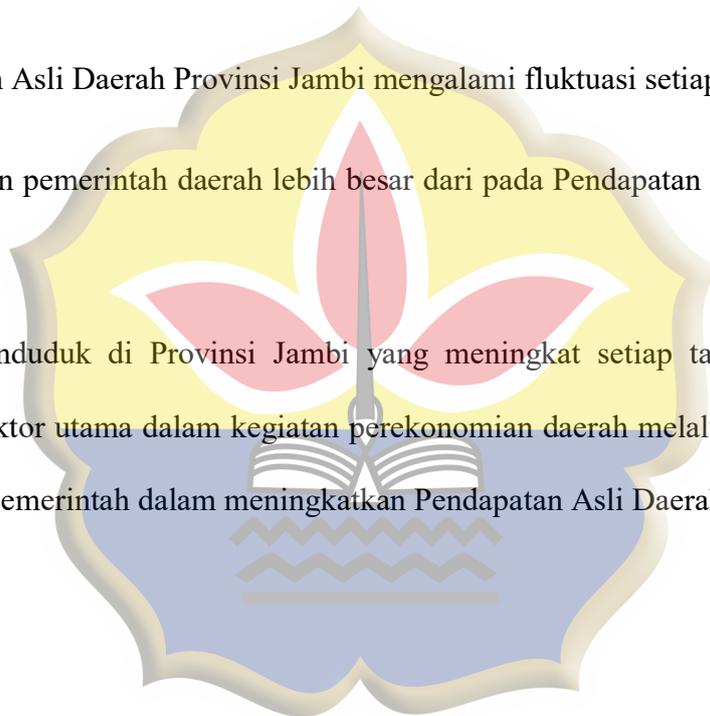
Berdasarkan tabel 1.3 Besarnya pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi pada tabel di hitung dari penjumlahan pengeluaran mulai dari gaji pegawai, belanja barang, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja modal, dan belanja hibah. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 1. 171.743.739.628 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan keterkaitan antar variabel, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2019”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti mengidentifikasi masalah salah satunya :

1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. Pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dari pada Pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.
3. Jumlah penduduk di Provinsi Jambi yang meningkat setiap tahunnya seharusnya menjadi faktor utama dalam kegiatan perekonomian daerah melalui wajib pajak yang di pungut pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019 .
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019 secara parsial.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis diharapkan bermanfaat bagi peneliti penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan masalah yang sama dengan penelitian ini
2. Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan instansi lembaga terkait dalam membuat kebijakan
3. an kebijakan yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah khususnya di Provinsi Jambi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur di daerah untuk memanfaatkan potensinya. Namun persoalannya ternyata cukup kompleks karena kecurigaan dan khawatir terjadinya disintegritas menjadi alasan pemerintah pusat untuk secara hati-hati merumuskan kebijakan ekonomi daerah.

Otonomi sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kajian mengenai sentralisasi dan desentralisasi menjadi sangat menarik jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu negara layak atau tidak untuk menerapkannya. Terdapat tujuh faktor yang mendorong suatu negara akan memakai desentralisasi atau cenderung memakai sentralisasi adalah faktor sifat dan bentuk negara, razim yang berkuasa, geografis, warga negara, sejarah, efisiensi

dan efektifitas dan politik. jika dihubungkan dengan negara Indonesia maka jelas tujuh faktor tersebut dapat diterapkan di negara ini.

Otonomi daerah ternyata telah membawa banyak perubahan pada pembangunan daerah. Daerah memiliki kebebasan lebih dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Namun kebebasan yang diberikan tersebut bukan tanpa control dari pemerintah pusat. Penerapan manajemen yang terukur menjadi penting untuk diterapkan dan dipahami.

Pelaksanaan otonomi sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, geografi, dan kemampuan dalam berorganisasi. Secara garis besarnya, pelaksanaan otonomi daerah ini hanya meliputi prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman, sedangkan untuk politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama kewenangan urusan pemerintah yang diberikan pada daerah (Josef, 2003: 65).

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2008, lambat laun beberapa kewenangan pemerintah pusat mulai didesentralisasi ke daerah kecuali untuk enam kewenangan yaitu kewenangan dalam di bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Tujuan desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyatnya melalui pengembangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Jenis-jenis desentralisasi serta ranah desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat ke daerah yaitu:

1. Desentralisasi politik; seperti pembagian kewenangan

2. Desentralisasi administrasi; pembagian kewenangan
3. Desentralisasi fiskal; pembagian keuangan berdasarkan *Money Follow Function*
4. Desentralisasi ekonomi; inisiatif lokal

Kemudian dari sistem desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat, salah satu yang menjadi tonggak berlangsungnya pembangunan suatu daerah yaitu desentralisasi ekonomi. Agar pelimpahan tugas desentralisasi itu berjalan baik, pemerintah memberikan kewenangan sumber-sumber pendapatan daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut (Rori, 2016:247).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebaian beban belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahu meningkat kemandiria otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga

perlaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012:101).

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 Pendaptan Asli Daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembanguna daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan dari PAD;

2.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah itu terbagi ada 2 yaitu Pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik darat maupun air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKKB), bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor.
4. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan setiap kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan air dan/atau tujuan lainnya.
5. Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah itu terbagi ada 2 yaitu Pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah kabupaten dan kota terdiri dari :

1. pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.
2. Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran.
3. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalam nya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjek nya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

4. Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.
5. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.
7. Pajak Parkir merupakan yang dipungut atas pembuatan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2.
8. Pajak Air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.
9. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lainnya.

2.1.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau badan. Objek dari Retribusi Daerah adalah:

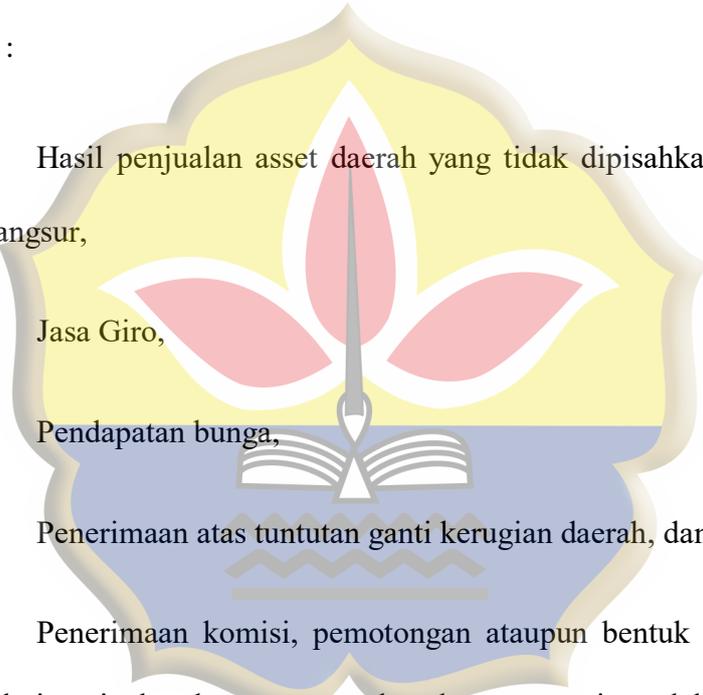
Retribusi Jasa Umum. Adapun yang termasuk dalam jasa umum adalah pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah dan pengujian kapal perikanan.

Retribusi Jasa Usaha. Adapun yang termasuk dalam jasa usaha adalah pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat penitipan anak, penginapan/pasanggrahan/vila, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengolahan air limbah, dan penjualan usaha produksi daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin gangguan, ijin trayek, dan ijin mengambil hasil hutan.

2.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah terdiri dari hibah dan pendapatan dana darurat. hibah merupakan bantuan yang tidak engikat. jenis-jenis pendapatan lain yang sah meliputi :

- 
1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur,
 2. Jasa Giro,
 3. Pendapatan bunga,
 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, dan
 5. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan ataupun pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan asli Daerah (PAD)

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan disuatu daerah menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut (Kirana:2002) beberapa faktor tersebut adalah

1. Kondisi awal suatu daerah;

Keadaan struktur ekonomi dan social suatu daerah menentukan : besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan, struktur ekonomi dan social suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan komposisi industri yang ada di daerah, stuktur sosial dan politik, kemampuan administrative, tingkat ketipangan dalam distribusi pendapatan.

2. Peningkatan Cakupan;

Kegiatan ini upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang meliputi menambahkan objek atau subjek retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tuggakan.

3. Perkembangan PDRB

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semaki besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan penduduk;

Besarna pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat

tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara proposional.

5. Tingkat Inflasi;

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif. Penyesuaian tarif pengikatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan pendapatan.

6. Pembangunan Baru;

Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru. Misalnya: pembangunan pasar, pembangunan terminal

7. Sumber Pendapatan Baru;

Adaya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Perubahan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pajak atau retribusi, akan meningkatkan pendapatan daerah.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian suatu negara, karena menentukan kondisi perekonomian negara tersebut. beberapa teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli seperti Wagner, Peacock, dan Wisman, Rostow dan Musgrave. Hubungan

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Menurut wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang menggiring pertumbuhan ekonomi, perkembangan dari ketidakefisienan birokrasi yang menggiring perkembangan pemerintah. Wagner sendiri menamakannya hukum aktivitas pemerintah meningkat.

Peacock dan wiseman mengungkapkan pendapat dalam rangka menjelaskan tentang perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Dalam pengertian bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang terlampau besar.

Hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut (Basuki, 2014: 176). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993: 169).

Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset Negara.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, social dan umum dan bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembagunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam priode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilitaskan (Basuki, 2014: 178).

Teori pengeluaran pemerintah juga dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan mikro.

2.1.3.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerinta. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono, 1999).

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Pengeluaran gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1. **Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

2. **Teori Adolf Wagner**

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila ada pendapatan per kapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

3. Peacock dan Wiseman

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasa gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

2.1.3.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

1. Teori Menurut Musgrave (1950: 207-208)

Mengemukakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek yaitu:

1. *Resources Transfer* (Perpindahan sumber daya)

Kebijakan anggaran pemerintah berupa pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan pengeluaran

pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.

2. *Incident* (Distribusi Pendapatan)

Perubahan alokasi input akibat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Di sisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input untuk publik.

3. *Output Effect* (Perubahan Terhadap Output)

Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya digunakan masyarakat juga meningkat.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan pada akhirnya

akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Wagner dalam Muslim, 2003: 14).

Pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (2000:44-45) dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah itu merupakan suatu investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga lebih yang lebih luas.

Dari penilaian ini dapat dibedakan macam-macam pengeluaran seperti :

1. Pengeluaran yang *Self-Liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lainnya akhirnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran yang tidak *Self-Liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan

masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek turisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya dengan baik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

2.1.4 Jumlah Penduduk

Menurut (Budiharjo, 2003:159) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak menarik perhatian para ahli ekonomi adalah ilmu tentang kependudukan (demografi). Hal tersebut karena penduduklah yang melakukan kegiatan ekonomi. Kualitas dan kuantitas penduduk suatu negara merupakan penentu yang paling penting bagi kemampuan produksi serta standar hidup suatu negara. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan penduduk menjadi hal yang sangat menarik untuk diperhatikan yaitu karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja, *human*

resources, disamping sumber faktor produksi *managerial skill* (Rosyidi, 2012:85-86).

Dalam teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik yang di polori Adam Smith yang menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga.

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk merupakan masyarakat yang tinggal di suatu daerah, secara hukum berhak tinggal didaerah tersebut dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, jumlah penduduk adalah kumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Dinegara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap Negara, dengan demikian tiap Negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula.

Pertumbuhan penduduk terbentuk akibat proses keseimbangan yang berubah-ubah dimana dapat mengurangi atau menambah jumlah penduduk, keseimbangan tersebut terjadi karena adanya tiga komponen yaitu:

1. Fertilitas (kelahiran)

Dalam istilah demografi, fertilitas dimaksudkan sebagai hasil dari reproduksi dari seorang atau sekelompok wanita. Fertilitas berkaitan dengan jumlah bayi hidup yang lahir. Fertilitas merupakan kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk, sehingga adanya fertilitas yang tinggi akan dapat menambah jumlah penduduk suatu daerah.

2. Mortalitas (kematian)

Mortalitas merupakan salah satu diantara tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk yaitu mengurangi jumlah penduduk. Data tentang kematian dari jumlah penduduk sangat penting bagi pemerintah maupun bagi pihak swasta terutama yang bergelut dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian ini sangat penting untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk guna perancangan pembangunan yang akan berpengaruh pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Data kematian juga digunakan untuk pembuatan peraturan dan program-program pemerintah dalam kebijakan penduduk.

3. Migrasi

Faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi. Migrasi diartikan sebagai berpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik cakupan nasional maupun internasional dengan tujuan untuk menetap. Migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah dalam masalah kepadatan dan tidak meratanya distribusi

penduduk. Migrasi menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah. Sehingga dengan adanya migrasi jumlah penduduk akan berimbang, akan tetapi berbeda halnya dengan migrasi penduduk karena pengungsian sementara.

2.1.5 Hubungan dan Keterkaitan antar Variabel

Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang hubungan dan keterkaitan antara variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Adapun masing-masing variabel tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. Hubungan dan Keterkaitan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya peningkatan jumlah penduduk di sebabkan oleh terjadinya pengembangan faktor yang mempengaruhi peningkatan penduduk seperti kelahiran, migrasi, kawin, dan mobilitas sosial. Dengan demikian semakin besarnya jumlah penduduk suatu daerah maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Evi Adriani, dkk 2008:4).

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (tolosang, dkk. 2018: 25).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Adam Smith mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah jika penduduk di suatu Negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian maka mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah.

2. Hubungan Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (Sukirno, 2014:168). Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan- pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat .

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah, tercipta ketika pemerintah menggunakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang publik yang menggambarkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya fasilitas pelayanan publik akan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga dengan meningkatnya perekonomian maka pemerintah berhak memungut pajak dan retribusi dari masyarakat atas jasa yang diberikan oleh pemerintah demi memfasilitasi aktivitas masyarakat dalam

ekonomi. Adanya pemungutan pajak ini akan memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan PAD



2.2 Penelitian Terdahulu

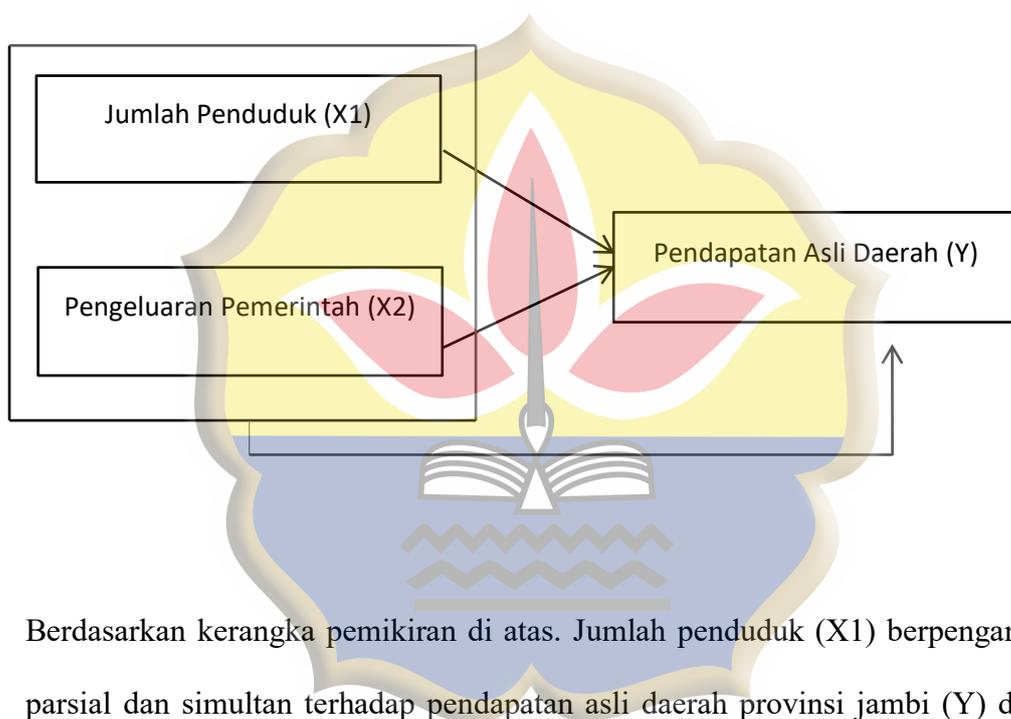
No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Evi Adriani (2008)	Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah sedangkan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten Merangin selama periode 1991/2006. Tetapi secara bersama-sama kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan.</p> <p>PDRB dan Jumlah penduduk mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat</p>
2.	Makdalena Asmuruf (2015)	F Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong	<p>Hasil penelitian ini menemukan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong dalam hal ini pembangunan perekonomian masih sangat minim hal ini sangat diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan.</p> <p>Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat.</p>
3.	Muh Ikram Idrus dan Irma (2017)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<p>Hasil dari pengujian statistik ternyata secara parsial variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

		(PAD) Di Makasar	<p>pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan $0,602(0,602 > 0,05)$, dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat sigifikansi $0,019(0,019 < 0,05)$.</p> <p>secara simultan atau bersama-sama kedua variabe X (pengeluaran pemerintah dan Jumlah penduduk) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (pendapatan asli daerah) dengan tingkat signifiansi $,028a(0,028 < 0,05)$.</p>
4.	Putri Ambar Kusuma (2014)	Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 33 Provinsi di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Inflasi dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Harry A. P. Sitaniapessy (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemeirntah Terhadap PDRB dan PAD	Hasil dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan baik secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1



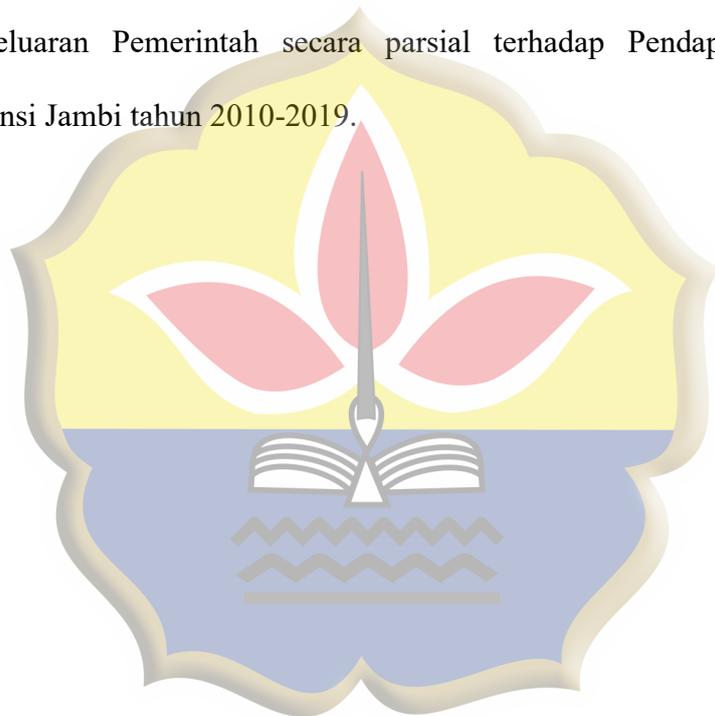
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas. Jumlah penduduk (X_1) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pendapatan asli daerah provinsi jambi (Y) didasarkan yang dikemukakan Arsyad, didukung oleh kajian penelitian Adriani (2008:4), Asmuruf (2015,376) , Idrus dkk(2015:32), dan Kusuma (2014:57).

Pengeluaran pemerintah (X_2) berpegaruh secara parsial dan simultan terhadap pendapatan aslia daerah provinsi jambi (Y) di dukung oleh kajian penelitian Kusuma(2014:57) dan Sitaniapess (2013:47).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019.
2. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-2019.



2.5 Metode Penelitian

2.5.1 Metode penelitian yang digunakan

1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan (Sembiring, 2003:44).

2. Studi Pustaka

Metode ini adalah penelitian kepustakaan atau catatan administrasi dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2.5.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) dengan kurun waktu kuartal dan tahunan yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

2. Sumber data

Data ini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jurnal-jurnal, laporan dan buku yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

2.5.3 Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang akan diteliti dengan beberapa metode yakni: studi kepustakaan dan media elektronik.

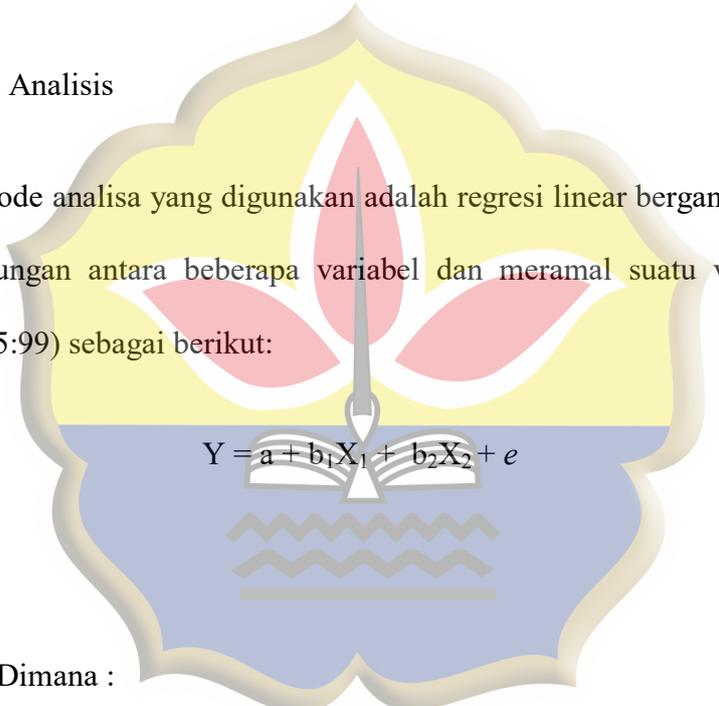
2.6 Metode analisis

1. Metode analisis yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode regresi linier berganda.

2. Alat Analisis

Metode analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel (Noer. A. 2005:99) sebagai berikut:


$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen

a = Konstan

b = koefisien

x = Variabel Independen

e = *error*

Dikarenakan satuan yang tidak sama maka menjadi :

$$\text{Log } Y = a + b_1 \text{ Log } X_1 + b_2 \text{ Log } X_2 + e$$

Dimana :

Log Y : Pendapatan Asli Daerah

a : konstanta

b1 : koefisien X1

b2 : koefisien X2

X1 : jumlah penduduk

X2 : pengeluaran pemerintah

e : *error*

Untuk log ini dapat diinterpretasikan langsung dimana keduanya dalam bentuk persen. Peningkatan X sebesar satu persen akan meningkatkan nilai Y sebesar pembuktiannya.

2.6.1 Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat keeratan hubungan linier antara dua buah variabel. Tingkat keeratan hubungan tersebut ditunjukkan dengan suatu besaran yang disebut koefisien korelasi $0 \leq R \leq 1$ yang berarti jika nilai R mendekati 0 berarti hubungan kedua buah variabel kurang kuat, dan jika nilai R mendekati 1 menunjukkan semakin besarnya hubungan kedua buah variabel tersebut. (Gujarati, 2011 : 27)

2.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat kekuatan variabel bebas yang dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur besarnya proporsi variasi-variasi variabel berikut (*dependent variable*) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (*independent variable*). Sifat yang dimiliki koefisien determinasi adalah : (Gujarati, 2011:27)

1. Nilai R^2 selalu positif karena merupakan nisbah dari jumlah kuadrat.

2. Nilai $0 \leq R^2 \leq 1$

$R^2 \leq 0$, garis regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan variabel dependen. $R^2 \leq 1$, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel dependen secara sempurna.

2.6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil *Best Linear Unblasted Estimator* (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Normalis, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang akan dilakukan (Ghozali, 2001).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Sunjoyo, 2013:59). Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiono (2014:13) uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen.

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya, yaitu:

- a. Dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi.
- b. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2), dan
- c. Dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi dan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai variabel *inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Kriteria pengujian yaitu :

Jika $r^2 > R^2$ maka terjadi multikolinearitas dan jika $r^2 < R^2$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat *grafik plot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila ada pola tersebut, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati *grafik scatter plot* pada *output* SPSS, dimana menurut Duwi Priyanto (2009) ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas,

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi *linear* terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau *time series* karena “pengganggu” pada seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan

pengujian *Berbin-Wation* (DW). Model dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai dw lebih besar dari nilai dw pada tabel.

2.6.4 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian regresi, ada dua pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas, yaitu pengujian secara serentak (Uji-F) an secara individu/parsial (Uji-t).

1. Uji – F Statistik

Uji F-Statistik (*Overal Test*) ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak cukup alasan untuk menolak H_0 dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ dan $df = \frac{V1}{V2} = \frac{n-1}{nt-n}$

Dengan uji ini akan dilihat pengaruh variabel Independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan H_0 dan H_a sebagai berikut :

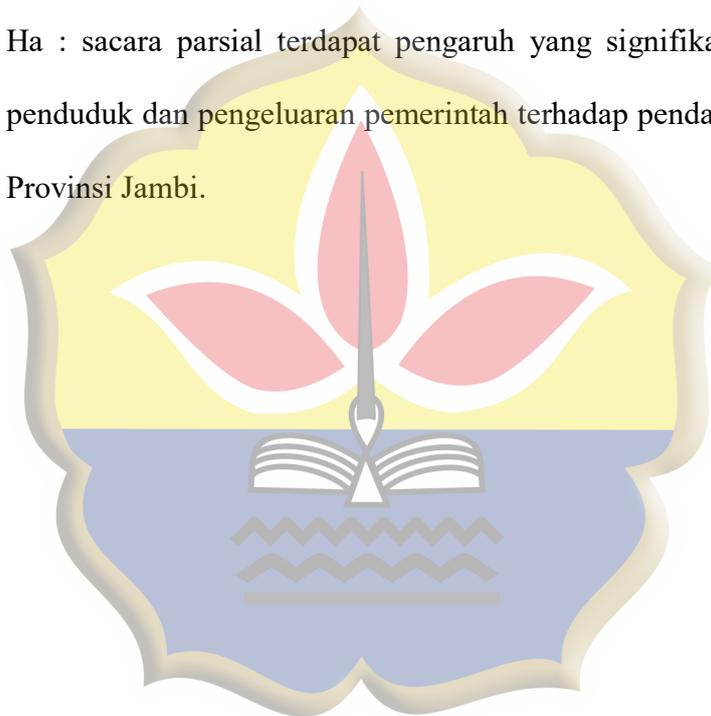
- a. H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli Provinsi Jambi.
- b. H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap Provinsi Jambi.

2. Uji – t Statistik

Uji t-statistik dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial.individu dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabelnya. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a

diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak cukup alasan untuk menolak H_0 dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan uji dua sisi dan $df = (n-k)$. Dengan uji ini dimaksudkan variabel-variabel independen secara parsial dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan ketentuan H_0 dan H_a sebagai berikut :

- a. H_0 : secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.
- b. H_a : secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.



2.7 Operasional Variabel

2.7.1 Variabel Dependen

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah ndapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari Retribusi daerah, Pajak daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang sah. Pendapatan asli daerah dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah.

2.7.2 Variabel Independen

1. Jumlah Penduduk (X1)

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk atau total penduduk pada suatu tempat tertentu. Jumlah penduduk yang dimaksud adalah jumlah penduduk pertengah tahun di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk dihitung dari angka kelahiran, angka kematian dan migrasi. Jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan Jiwa.

2. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud adalah belanja pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBD dan yang ada dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja modal, belanja bangunan, belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subisidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pengeluaran Pemerintah dinyatakan dalam satuan Rupiah

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Letak Geografis Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala

Dari letak geografis ini terlihat bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak ditengah-tengah pulau Sumatera yang mempunyai hubungan terbuka dengan daerah-daerah lain. Dengan letak geografis itu maka sangat menguntungkan Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang dan memacu serta mendorong lajunya pembangunan di Provinsi Jambi. Luas Provinsi Jambi sebesar 53.435 km^2 , dimana secara administratif Provinsi Jambi sebelum adanya pemekaran terbagi atas 6 daerah tingkat II dengan distribusi wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci : 4.200 km^2 .
2. Kabupaten Bungo Tebo : 13.500 km^2 .
3. Kabupaten Sarolangun Bangko : 14.200 km^2 .
4. Kabupateng Batanghari : 11.130 km^2 .
5. Kabupaten Tanjung Jabung : 10.200 km^2 .
6. Kabupaten Madya Jambi : 205 km^2 .

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sarolangun Bangko merupakan wilayah kabupaten yang mempunyai luas terbesar yaitu 14.200 km², selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab dan Kabupaten Kerinci serta daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Kota Jambi dengan luas wilayah 205 km² dari total keseluruhan luas Provinsi Jambi.

Sejak 12 oktober 1999, Provinsi Jambi mengalami pemekaran wilayah yaitu dari 6 Kabupaten/Kota menjadi 10 Kabupaten/Kota. Adapun kabupaten-kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut meliputi, Kabupaten Batanghari Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muara Jambi Ibukota Sengeti, Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muara Sabak dan Tanjung Jabung Barat dengan Ibukota Kuala Tungkal, Kabupaten Sarolangun Bangko dipecah menjadi Kabupaten Merangin dengan Ibukota Bangko dan Kabupaten Sarolangun dengan Ibukota Sarolangun, Kabupaten Tebo dipecah menjadi Kabupaten Bungo dengan Ibukota Muara Bungo dan Kabupaten Tebo dengan Ibukota Muara Tebo.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas (Km ²)
Kerinci	Sungai Penuh	4.200
Bungo	Muara Bungo	7.160
Tebo	Muara Tebo	6.340
Sarolangun	Sarolangun	7.820
Merangin	Bangko	6.380
Batanghari	Muara Bulian	4.983
Muaro Jambi	Sengeti	6.147
Tanjab Barat	Kuala Tungkal	4.870
Tanjab Timur	Muara Sabak	5.330
Kota Jambi	Jambi	205,38
Provinsi Jambi		53.435

Berdasarkan tabel 3.1 dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Jambi dengan adanya sistem pemerintahan baru yang memiliki program kerja yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari wilayah yang mengalami pemekaran, hal ini didukung oleh program pemerintah yang bersifat *bottom up* yaitu otonomi daerah.

3.2 Topografi

Provinsi Jambi dengan luas 53.435 km², dibagi menjadi tiga satuan topografi yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan.

1. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 m, merupakan daerah terluas, kira-kira 67,21% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Rawa-rawa banyak dijumpai di daerah ini. Daerah dataran rendah terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bangko.
2. Dataran tinggi merupakan peralihan dari dataran rendah ke arah pegunungan meliputi daerah perbukit dengan ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut. Luasnya sekitar 18,04% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Daerah dataran tinggi terdapat di daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangko, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan sebagian dari Kabupaten Batanghari.
3. Daerah pegunungan merupakan bagian dari bukit barisan dengan ketinggian antara 500 – 3.800 m dari permukaan laut. Luasnya sekitar 14,74% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Yang meliputi Kabupaten Kerinci dan sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bangko.

3.3 Kependudukan

Dalam pembangunan ekonomi, penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sebab penduduk merupakan tenaga yang potensial untuk melakukan pembangunan tersebut apabila digunakan semaksimal mungkin. Disamping itu jumlah penduduk yang cukup besar dari satu sisi dapat menjadi modal dasar pembangunan dan jumlah penduduk juga dapat menghambat pembangunan ekonomi apabila komposisi penduduk usia kerja lebih kecil bila dibandingkan dengan diluar usia kerja dan tinggi nya tingkat pengangguran.

Jumlah penduduk Provinsi Jambi periode tahun 2010 – 2020 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tingkat kelahiran yang tinggi dan penurunan tingkat kematian akibat dari kesehatan yang semakin baik serta adanya penduduk pendatang dari luar daerah melalui program transmigrasi.

Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010 – 2020 (jiwa)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Perkembangan %
2010	1.586.100	1.521.510	3.107.610	-
2011	1.616.688	1.550.890	3.167.578	1,92
2012	1.647.019	1.580.077	3.227.096	1,88
2013	1.677.052	1.609.018	3.286.070	1,83
2014	1.706.746	1.637.675	3.344.421	1,78
2015	1.736.049	1.666.003	3.402.052	1,72
2016	1.764.935	1.693.991	3.458.926	1,67
2017	1.793.389	1.721.628	3.515.017	1,62
2018	1.821.381	1.748.891	3.570.272	1,57
2019	1.848.854	1.775.725	3.624.579	1,52
2020	1.875.781	1.802.113	3.677.894	1,47

Sumber : BPS (Hasil Proyeksi Sensus Penduduk), 2010

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010 jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 1.586.100 sampai di tahun 2020 1.875.781 dan tahun 2010 jumlah penduduk menurut jenis kelamin perempuan 1.521.510 sampai di tahun 2020 1.802.113, dengan jumlah keseluruhan jumlah penduduk laki – laki dan perempuan tahun 2010 sebanyak 3.107.610 jiwa dan jumlah penduduk laki – laki dan perempuan tahun 2020 3.667.894.

3.4 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah tergantung pada kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa yang memperlihatkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonominya.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Persektor Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010
Tahun 2011 - 2020
(dalam persen%)

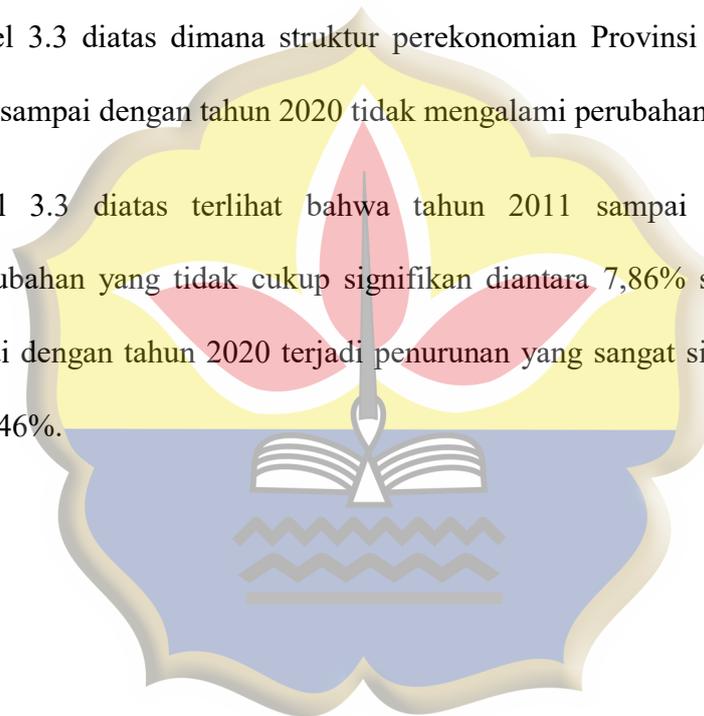
No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,73	6,81	6,21	10,95	5,46	6,36	5,37	3,35	2,94	1,53
2.	Pertambangan dan Penggalan	12,41	4,88	3,83	4,24	-0,23	0,44	3,84	5,89	4,73	-2,21
3.	Industri Pengolahan	8,30	7,19	8,17	-4,81	2,33	2,29	2,61	3,39	2,58	0,23
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,32	9,67	8,73	15,34	7,48	6,16	1,70	5,61	5,82	4,59
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	5,21	0,82	1,87	4,35	4,08	5,02	2,60	4,24	4,00	1,98
6.	Konstruksi	5,52	17,02	19,49	8,92	3,33	3,54	7,22	5,22	6,90	0,88
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Mobil dan Sepeda Motor	8,34	8,86	8,22	8,80	10,32	6,94	4,33	5,94	5,91	-3,54
8.	Transportasi dan Pegudangan	5,81	8,42	7,88	8,18	6,59	8,29	5,98	5,21	3,59	-14,43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	7,73	6,40	18,73	6,49	7,65	7,95	6,07	5,62	-6,83
10.	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,36	6,53	7,01	9,83	8,51	6,60	7,53	6,20	8,48
11.	Jasa Keuangan	20,79	9,98	11,81	3,84	2,11	10,38	3,06	-0,14	1,92	6,97

	dan Asuransi										
12.	Real estate	6,05	5,66	4,93	2,20	4,19	4,31	4,61	5,04	6,91	-0,47
13.	Jasa Perusahaan	1,49	4,22	2,04	5,00	6,32	5,24	4,32	4,67	3,96	-5,73
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	3,96	4,57	13,38	6,79	3,01	2,52	4,37	5,49	-2,39
15.	Jasa Pendidikan	2,48	6,34	5,39	1,28	7,48	6,04	4,24	5,44	5,75	3,15
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,80	8,78	8,07	15,19	10,05	6,64	5,49	5,54	7,12	6,76
17.	Jasa Lain-Lain	3,80	3,31	4,80	5,55	8,76	6,59	4,54	5,52	4,14	-3,63
18.	PDRB	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Struktur perekonomian suatu daerah tergambar dari pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendasari struktur perekonomian daerah tersebut. Terlihat pada tabel 3.3 diatas dimana struktur perekonomian Provinsi Jambi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang begitu besar.

Pada tabel 3.3 diatas terlihat bahwa tahun 2011 sampai tahun 2014 masih dikategorikan perubahan yang tidak cukup signifikan diantara 7,86% sampai 7,36%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 4,21% sampai dengan -0,46%.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Sebelum mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi terlebih dahulu data harus memenuhi standar asumsi klasik.

4.1.1.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk melihat distribusi normal dalam suatu regresi kita bisa menggunakan SPSS versi 22 dengan melihat one sample K-S ;

Tabel 4.1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04611399
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,141
	Negative	-,160
Kolmogorov-Smirnov Z		,506
Asymp. Sig. (2-tailed)		,960

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa $0,960 > 0,5$ itu mengartikan bahwa data berkontribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model linear berganda. Uji ini dilakukan dengan tolerance value dan varians inflation factor (VIF). Jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. $VIF = 1 / \text{Tolerance}$, jika VIF 10 maka $\text{Tolerance } 1 / 10 = 0,1$, semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance. berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22 diperoleh nilai koefisien sebagai berikut :

Tabel 4.2

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	,564	1,774
X2	,564	1,774

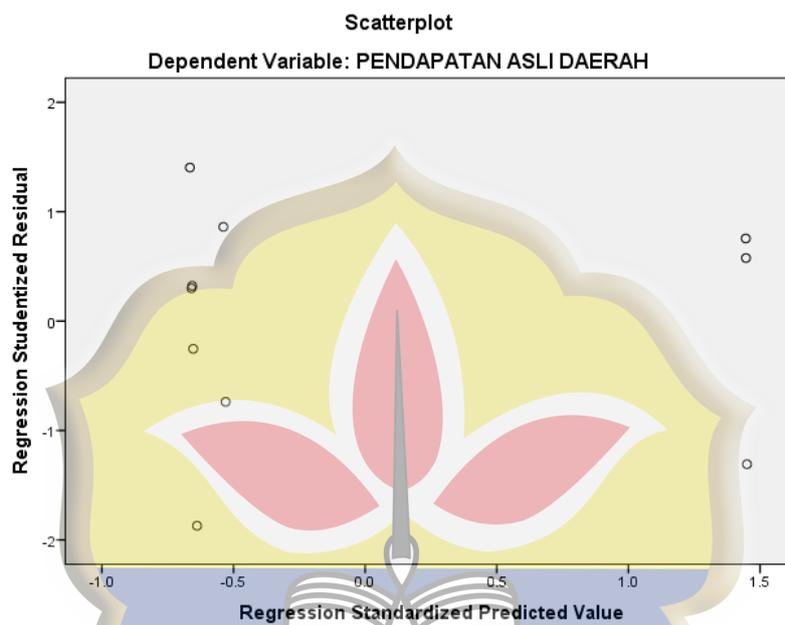
Dari hasil uji tabel 4.2 diatas uji dilakukan dengan tolerance value dan varians inflation factor bisa dilihat nilai VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model ini dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas, dari VIF di atas $1,774 < 10$ dan $1,774$ dari tolerance $0,564 > 0,1$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang

memenuhi persyaratan adalah dimana tidak terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan SPSS versi 22 dengan melihat grafik scatterplot pada gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4.1



Dari gambar diatas dapat dilihat dari uji model ini yang memenuhi syarat adalah dimana tidak terdapat kesamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut heterokedastisitas, dari gambar diatas terlihat bahwa titik tidak membentuk pola teratur atau tersebar dari atas dan bawah titik -2.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Variasi sampel-sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasi nya. Model regresi yang digunakan tidak dihasilkan untuk menaksir nilai variabel dependen dari variabel independen, untuk mengetahui

autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian Durbin-Waston (Dw) dengan menggunakan SPSS versi 22 seperti yang ditunjukkan tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.3

Model Summary^b

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	,925 ^a	,856	,815	,05229	2,095

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian durbin-waston (DW), pada data penelitian ini didapatkan nilai DW 2,095 dan DU 1,6413 dapat disimpulkan nilai $DU < DW$ dan $DW < 4-DU$, apabila DW 2,095 maka $4-1,6413$ adalah 2,3589 jadi $DW 2,095 < 2,3587$ berdasarkan modul yang di lihat di lab statistik dan ada catatan tabel durbin watson.

4.1.1.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) maka dilakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 22, dengan model persamaan sebagai berikut

$$\text{Log } Y = a + b_1 \text{ Log } X_1 + b_2 \text{ Log } X_2 + e$$

Adapun estimasi untuk setiap parameter dari output SPSS adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,342	1,465		2,964	,021
X1	,071	,073	,185	,968	,365
X2	,584	,141	,792	4,144	,004

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil Output tersebut maka persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Log } Y = 4,342 + 0,071X_1 + 0,584X_2 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 4,342 dapat diartikan bahwa jika jumlah penduduk (X₁) dan Pengeluaran Pemerintah konstan maka Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jambi akan naik sebesar 4,342.
2. Nilai koefisien (b₁) sebesar 0,071 dapat diartikan bahwa jika Jumlah Penduduk (X₁) naik 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jambi akan naik sebesar 0,071%.
3. Nilai koefisien (b₂) sebesar 0,584 dapat diartikan bahwa jika Pengeluaran Pemerintah (X₂) naik 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jambi akan naik sebesar 0,584%.

4.1.1.3 Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat keeratan hubungan linier antara 2 buah variabel, tingkat keeratan hubungan tersebut ditunjukkan dengan suatu besaran yang disebut koefisien korelasi $0 \leq R \leq 1$ yang berarti jika nilai R mendekati 0 berarti hubungan kedua variabel kurang kuat dan jika R mendekati 1 menunjukan semakin

besarnya hubungan kedua variabel tersebut, koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Koefisien korelasi (R) dan Determinasi (R Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,925 ^a	,856	,815	,05229	2,095

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

b. Dependen Variabel: Log PAD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi atau nilai R adalah sebesar 0,925 hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat keeratan hubungan kedua variabel cukup kuat karena nilai R mendekati 1 sebesar 0,925.

4.1.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pengujian model akan didapatkan pula koefisien determinasi R^2 , semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin baik model tersebut dalam arti semakin besar kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat, nilai R^2 meningkat dengan bertambahnya variabel bebas dalam persamaan, namun dengan menambah variabel bebas maka semakin kecil, karena itu digunakan R^2 adjusted yang sudah mempertimbangkan derajat bebas, berikut ini hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,925 ^a	,856	,815	,05229	2,095

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi (R square) dengan rumus $kd=R^2 \times 100\%$. $0,815 \times 100\% = 81,5\%$ artinya bahwa 81,5% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan 18,5% sisanya dijelaskan variabel lain diluar model.

4.1.1.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji f

Hasil uji statistik secara bersama sama atau disebut juga uji f – statistik *overaltest*, uji f ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara bersama sama dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel yang di dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ dan $df = \frac{v1}{v2} = \frac{2}{14}$. Dengan uji ini akan dilihat pengaruh koefisien independensi secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,114	2	,057	20,769	,001 ^b
Residual	,019	7	,003		
Total	,133	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah

Dari tabel di atas dilihat bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai f-hitung dari ANOVA sebesar 20,769 dengan $\alpha = 5\%$ dan df di ketahui nilai f-tabel sebesar 4,74 itu artinya nilai f-hitung $>$ f-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti secara bersama-sama variabel Jumlah Penduduk (X_1), Pengeluaran Pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah () di Provinsi Jambi

2. Uji t

hasil perhitungan SPSS dengan uji t atau uji t-statistik *parsial test*, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi regresi secara parsial dengan membandingkan nilai t- hitung dengan t- tabel yang dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ dan $df = (n - k) = 14$, dengan uji ini dimaksudkan variabel-variabel independen secara parsial dapat menjelaskan variabel dependen, dari hasil pengolahan data diperoleh output yang dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,342	1,465		2,964	,021
Jumlah penduduk	,071	,073	,185	,968	,365
Pengeluaran pemerintah	,584	,141	,792	4,144	,004

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

1. Pengujian korelasi regresi variabel jumlah penduduk (X_1) nilai t hitung variabel jumlah penduduk (X_1) sebesar 0,968 dengan $df = 2,306$ artinya nilai t -hitung $< t$ tabel maka h_0 di tolak dan h_a d terima berarti pada penelitian ini Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
2. Pengujian korelasi regresi variabel pengeluaran pemerintah (X_2) nilai t hitung variabel pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar 4,144 dengan $df = 2,306$ artinya nilai t -hitung $> t$ tabel maka h_0 di tolak dan h_a d terima berarti pada penelitian ini Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil uji f-hitung diperoleh sebesar 20,769 dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = \frac{v1}{v2} = \frac{2}{14}$ diketahui nilai f tabel 4,74 itu artinya nilai f-hitung $>$ f-tabel, artinya secara bersama sama jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi.

Dari koefisien determinasi 81,5% hal ini menunjukkan bahwa variable-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 81,5%, sedangkan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dalam teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith yang menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Sukirno yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksana pembangunan yang berkelanjutan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga yang digunakan. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian oleh Ihwan (2018) yang berjudul “Pengaruh Jumlah penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Provinsi Sumatera

Utara” dengan hasil variabel jumlah penduduk (X_1), Pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

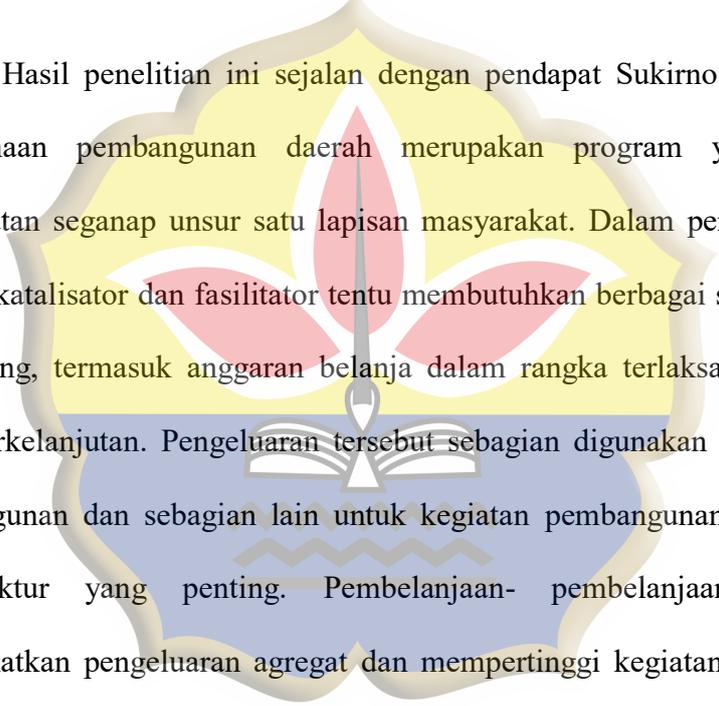
Berdasarkan estimasi linier berganda menunjukkan bahwa uji t dalam variable jumlah penduduk nilai t hitung 0,968 dengan $df=2,306$ dan menggunakan uji dua sisi dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ di diketahui nilai t tabel sebesar 2,306 artinya nilai t hitung $< t$ tabel dan ini berarti penelitian ini variable komponen jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi jambi.

Dalam penelitian ini variable komponen jumlah penduduk Provinsi Jambi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi, hal tersebut dikarenakan Jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi PAD adalah penduduk yang produktif. Hal ini sejalan dengan Dalam teori yang dikemukakan oleh Adam Smith mengatakan bawa peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah jika penduduk di suatu Negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian maka mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Lalu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2008) dengan hasil uji signifikansi parsial terhadap jumlah penduduk menunjukkan t-hitung $> t$ -tabel yaitu $(-1,020 > 1,356)$.

Masih adanya ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah satu sama lain, oleh karena itu pendapatan asli daerah masing-masing wilayah Provinsi Jambi tidak merata.

4.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan estimasi linear berganda menunjukkan bahwa uji t dalam variabel pengeluaran pemerintah nilai t hitung variabel pengeluaran pemerintah sebesar 4,144 dengan $df = 2,306$ dan menggunakan uji dua sisi tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ diketahui nilai t tabel 2.364 artinya nilai t hitung $>$ t tabel ini berarti dalam penelitian ini variabel komponen pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.



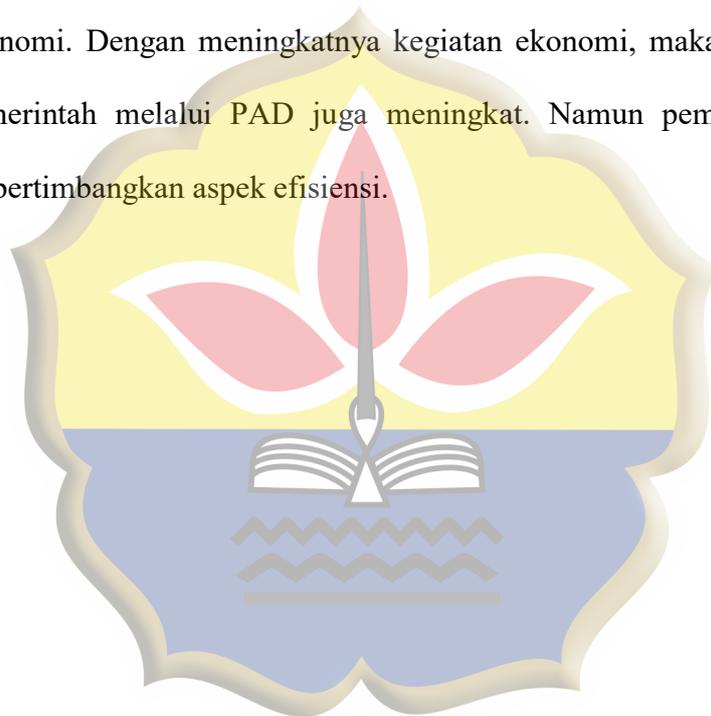
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sukirno yang menyatakan Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksanya pembangunan yang berkelanjutan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan- pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zein (2018) dengan hasil t-hitung $>$ t-tabel $8,070640 <$ $2,0518$.

Hal tersebut dikarenakan pengeluaran pemerintah provinsi jambi sesuai dengan pendapatan asli daerah, dari masing-masing wilayah Provinsi Jambi.

4.3 Impikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Penduduk dengan usia produktif dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
2. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan birokrasi dan administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan- pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 4.2.1.1 Secara simultan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi jambi, semakin besar pendapatan asli daerah serta di pengaruhi pula dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah maka semakin baik pula di berbagai sektor pemerintahan di hitung dari PAD.
- 4.2.1.2 Secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi disebabkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk untuk pendapatan asli daerah tidak mempunyai andil besar karena untuk menyerap pendapatan daerah dilihat dari sektor perpajakan, retribusi dan pendapatan lain yang disahkan
- 4.2.1.3 Secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi sebabkan dari pengeluaran pemerintah berkontribusi untuk sumber pembiayaan daerah dan birokrasi serta menunjang pembangunan daerah.

5.2 Saran

1. PAD lainnya yang dianggap sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan asli daerah menjadi sektor yang sangat penting, yang salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan sumber dana dari daerah sendiri.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah harus di tempuh dan di pertahankan serta di dukung oleh masyarakat baik berupa perbaikan di sektor bidang seperti pajak, retribusi, pendapaatan yang disahkan lainnya, serta perbaikan di berbagai infrastruktur demi menunjang kemajuan ekonomi khusus nya di provinsi jambi.

2. Untuk Pemerintah Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi sehingga dapat meningkatkan PAD atau menambah penghasilan daerah tersebut.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lainnya yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi daerah peneliti yang tidak dimasukan ke dalam model.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Evi dan handayani. 2008. *Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Merangin*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.8 No.2.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan* edisi 5. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. *Realisasi Anggaran*. 2010
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. *Jumlah Penduduk*. 2010
- Batik, Karlina. 2013. *Analisis Pengaruh Investasi PDRB Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan dan Inflasi terhadap PAD di Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 11 No 01.
- Husna, Umdatul. 2015. *Pengaruh PDRB,Inflasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Sejava Tengah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang. Skripsi
- Harahap, Ikhwanuddin. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol 6 No 2.
- Idrus, Muh dan Irma. 2017. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar*. *Jurnal Balance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 13 No 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*.Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kusuma, Putri. 2014. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 33 Provinsi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta: Surakarta. Skripsi
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Makdalena, dkk. 2015. *Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 No 05.
- Munir, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Pangiuk, Ambok. 2017. *Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. *Iltizam Journal Of Shariah Econimic Research*, Vol 1 (2) :hal: 2

Prasetya, Ferry. 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah* bagian V. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: Malang. Jurnal.

Sitaniapessy, Harry. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD*. Jurnal *Economia*, Vol 9 No 1.

Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik* edisi pertama. Purwokerto : ANDI Yogyakarta.

Tolosang, dkk. 2016. *Pengaruh Pendapatan Perkapita Jumlah Perusahaan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No 01

Zein, Aliman. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Islam. Vol 6 No 1.

